



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 9329-9341

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Musafir Jasin^{1✉}, Kodrat Rippi², Amra³, Sri Wahyuti⁴

STISIP Veteran Palopo

Email: asryriwahyuti@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana proses implementasi kebijakan dalam penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta mengidentifikasi faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran KKS di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dimana data diambil menggunakan data DTKS 2011 serta melakukan wawancara dengan narasumber yang dianggap relevan dalam permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Takkalala yang memiliki jumlah masyarakat miskin sekitar 777 KK, dengan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan rincian sebanyak 263 KK yang tersebar di 15 RT di wilayah Kelurahan Takkalala. Bantuan yang diberikan untuk saat ini berupa Bantuan Tunai senilai Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap bulannya. Hasil pelaksanaan kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala masih belum berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan ada beberapa warga miskin yang masih belum bisa menerima manfaat dari bantuan sosial ini terutama bantuan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pihak yang menangani program ini, serta data penerima program ini tidak akurat dan tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan banyaknya kecemburuan antar warga yang ada di wilayah itu.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Kartu Keluarga Sejahtera*

Abstract

This research aims to analyze the extent of the policy implementation process in the distribution of Prosperous Family Cards (KKS) and identify factors that are obstacles in the distribution of KKS in Takkalala Village, South Wara District, Palopo City. The research method used is qualitative, where data was taken using 2011 DTKS data and conducting interviews with sources who were considered relevant to this research problem. The results of this research show that Takkalala Village has a number of poor people around 777 families, with a total of 263 Family Welfare Card (KKS) recipients spread across 15 RTs in the Takkalala Village area. The assistance currently provided is in the form of cash assistance worth IDR 200,000 per month which will be distributed every month. The results of the implementation of the Prosperous Family Card (KKS) program policy in Takkalala Village are still not running well and effectively because there are several poor residents who are still unable to receive the benefits of this social assistance, especially the Prosperous Family Card (KKS) program assistance, lack of socialization and coordination from The parties handling this program, as well as the data on recipients of this program, are inaccurate and not on target, giving rise to a lot of jealousy between residents in the area.

Keywords: *Implementation, Policy, Prosperous Family Card*

PENDAHULUAN

Respon pemerintah terhadap masalah kemiskinan dijabarkan melalui beberapa kebijakan yang dimandatkan kepada Kementerian/ Lembaga Negara yang berwenang dalam menjalankan kebijakan tersebut. Istilah kebijakan berasal dari kata *policy*. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak (Suharno, 2013).

Kebijakan selalu berorientasi pada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah ketentuan yang mengandung prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Subejo, 2007). Dalam implementasi kebijakan, ada 3 (tiga) perspektif untuk mengukur keberhasilan implelementasi kebijakan, yaitu: (a) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; (b) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi; dan (c) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (Sumatsa, 2021).

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bahwasannya penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan serta program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dalam bidang usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin untuk meningkatkan derajat kesejahteraan

rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif, Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM), masyarakat diberikan 3 kartu, salah satunya adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menandai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini adalah bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui pelaksanaan program ini, diperkenalkan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau masyarakat meningkatkan harkat dan martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan serta pemberdayaan dan tidak hanya diberikan bantuan amal. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan suatu program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu Rumah Tangga Miskin dan rentan yang terdampak pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), supaya mereka yang tergolong kurang mampu dapat terbantu dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini memiliki tujuan dalam menurunkan masalah kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor.541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS) Sebagai Pengganti Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari APBN-P 2014.

Secara nasional penerima KKS telah mencapai 18,8 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yang dalam bentuk layanan keuangan melalui PT. Pos Indonesia di wilayah masing-masing secara bertahap di tahun 2022. Setiap keluarga diberikan sebanyak Rp 200.000 per bulan per keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 14 daerah yang lolos menerima bantuan KKS 2021 yakni Pinrang, Soppeng, Bantaeng, Barru, Wajo, Luwu, Gowa, Takalar, Sinjai, Jeneponto, Enrekang, Luwu Timur, Pare-Pare dan Palopo (Abdul Kadir, 2021).

Kelurahan Takkalala adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia yang mendapatkan mandat untuk mengimplementasikan penyaluran program bantuan bagi masyarakat miskin yaitu program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kelurahan Takkalala merupakan Kelurahan yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Wara Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 7.111

jiwa yang terdiri dari 2.038 Kepala Keluarga. Kelurahan Takkalala juga termasuk Kelurahan yang memiliki jumlah masyarakat miskin sekitar 777 KK, dengan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan rincian sebanyak 263 KK yang tersebar di 15 RT di wilayah Kelurahan Takkalala. Bantuan yang diberikan untuk saat ini berupa Bantuan Tunai senilai Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap bulannya.

Dalam pelaksanaannya cukup banyak kalangan masyarakat yang kurang setuju dengan program KKS ini. Ada yang berpendapat bahwa program KKS kepada Rumah Tangga Sasaran bersifat *charity* dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-minta belas kasihan pemerintah serta menumbuhkan budaya konsumtif sesaat serta peristiwa pemberian KKS yang salah sasaran fakir miskin yang diperintahkan oleh hukum tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, cermat, dan sepenuhnya oleh pemerintah. Tetapi terdapat pula warga yang memerlukan serta sepakat dengan adanya program KKS ini, meski jumlah dana yang mereka terima tidak begitu besar tetapi sebagian pengamat maupun golongan menilai positif dengan munculnya program bantuan ini pasti akan menaikkan pemasukan ataupun pendapatan keluarga, sehingga bisa menaikkan pemenuhan kebutuhan pokok yang mereka perlukan tiap hari. Serta sering pula terdapat warga yang kurang sepakat dengan dijalankannya program KKS ini, sebab mereka malah lebih memilih serta memerlukan program penanggulangan kemiskinan yang lebih berguna buat mendukung kelangsungan hidup mereka melalui penciptaan lapangan usaha, serta program mendidik yang lain.

Pengelolaan penanganan fakir miskin oleh pemerintah masih jauh dari tuntutan Undang-undang dan harapan kaum fakir miskin karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Penggunaan KKS dan penyalurannya belum tepat sasaran. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

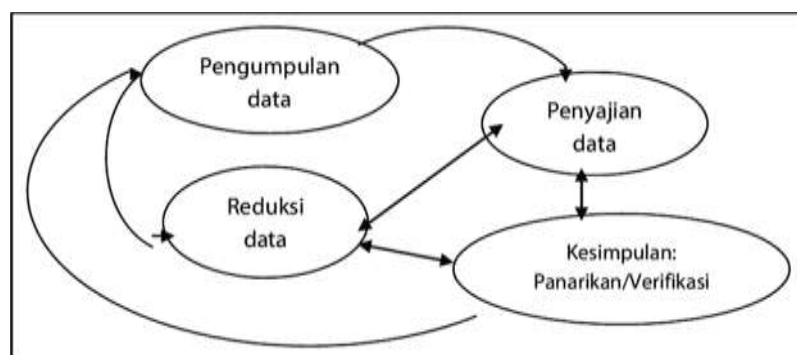
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui masalah apa yang sering dihadapi oleh Kelurahan khususnya mengenai pelaksanaan program bantuan sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang merupakan suatu proses pemahaman analitis berdasarkan metodologi yang digunakan untuk memperoleh gambaran untuk memahami

dan menjelaskan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Pemerintah Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan. Untuk efektifnya penelitian ini dilakukan penelitian *Ex-Post Facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan selanjutnya memperhatikan hasil-hasil yang dicapai sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan dalam pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Kantor Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi; observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Kemudian data di analisis kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles and Hubberman yang dilakukan melalui tiga tahapan analisis data, yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi (Sugiyono, 2014).

Secara lebih terperinci langkah-langkah yang akan digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles and Hubberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kemiskinan ialah salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam kurangi angka kemiskinan. Pemerintah dikala ini mempunyai bermacam program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi semacam program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, karena suatu daerah dapat dikatakan sejahtera apabila daerah tersebut mampu mengurangi kemiskinan, maka penduduk miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan atau memiliki mata pencaharian tetapi tidak memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah yang sesuai dengan dirinya atau keluarganya, oleh karena itu pemerintahan Presiden Joko Widodo Widodo melalui cita-citanya, pemerintah akan meningkatkan

produktivitas kesejahteraan melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan warga.

Salah satu bentuk program ini adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai penanda bagi keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Membangun Keluarga Produktif.

Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Takkalala

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat dilakukan secara efisien sehingga dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, distribusi bantuan layanan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bansos dan berkontribusi pada peningkatan keuangan inklusif. Pelaksanaan metode penyaluran bantuan sosial nontunai ini menggunakan buku tabungan dan Kartu KKS yang merupakan upaya mengajak masyarakat untuk mengenal perbankan, sistem distribusi non tunai akan ditransfer ke rekening keluarga penerima (KPM). Kartu KKS ini memiliki fitur *saving account* dan *e-wallet* yaitu satu kartu dapat digunakan untuk berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Van Metter dan Van Horn, proses implementasi ialah abstraksi atau kinerja dari suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja tinggi dari implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam kaitannya dengan berbagai variabel. Dengan adanya pengimplementasian yang baik maka dapat diperoleh hasil yang efektif (Agustino, 2016).

Guna menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diharapkan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, Peneliti menggunakan teori dari Meter dan Horn (1975) mengenai model implementasi kebijakan publik sebagai indikator dalam menganalisis implementasi kebijakan Program KKS yang ada di Kelurahan Takkalala Kota Palopo, yang terdiri dari 6 (enam) variabel, yaitu:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan ini merupakan tolak ukur dalam suatu kebijakan, dengan adanya keberhasilan suatu kebijakan ini dapat dilihat dari bagaimana tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa tujuan diadakannya program ini sudah jelas sedangkan dalam sasaran penerima KKS masih banyak yang tidak tepat sasaran dikarenakan data yang dipakai sebagai acuan masih menggunakan data tahun 2011. di Kelurahan Takkalala, jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan rincian sebanyak 263 KK yang tersebar di 15 RT Bantuan yang diberikan untuk saat ini berupa Bantuan Tunai senilai Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap bulannya.

Tujuan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ialah membantu warga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, menghindari menyusutnya taraf kesejahteraan warga miskin serta rentan akibat kesusahan ekonomi, dan dalam mengurangi permasalahan kemiskinan serta dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya program bantuan KKS ini pemerintah bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat, menangani masalah ekonomi yang menimpa masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, dan diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan penyalurannya tepat sasaran.

Selain itu dalam implementasi penyaluran bantuan, dari data yang dihasilkan di lapangan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah memutuskan untuk memberikan dalam bentuk tabungan. Adapun alasan pemberian bantuan ini dalam bentuk simpanan ialah:

- a. Tabungan/simpanan adalah suatu bentuk kegiatan produktif;
- b. Tabungan/simpanan adalah bagian dari strategi inklusif nasional keuangan;
- c. Penyelesaian program BLSM 2013, yang hanya menyalurkan uang tunai, dan mengurangi antrian.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan tanda bahwa pemegang kartu berhak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Pemegang KKS akan diberikan SIM Card yang bisa dipasang di ponselnya untuk cek saldo. Fungsi SIM Card ini mirip dengan rekening bank. Untuk mengambil uang dari pemerintah, Anda bisa datang ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan nomor SIM card. Layanan ini biasa disebut e-money atau layanan keuangan digital, atau dengan bisa melihat distribusinya melalui aplikasi *141*6# dari ponsel mereka.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa aturan dalam program KKS ini, yakni sebagai berikut:

- a. Kategori Penerima adalah Rumah tangga miskin dan orang dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk tuna wisma, penghuni panti asuhan, panti jompo.
- b. Pencairan Dana. Dana bantuan untuk penerima BPNT atau Penerima KKS sebanyak Rp 28,7 triliun dari bantuan sosial kementerian sosial, yang dimana setiap keluarga mendapatkan bantuan sebanyak Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap 3 bulan. Untuk pencairan melewati Kantor PT.Pos Indonesia.
- c. Syarat untuk Mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Adapun syarat untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu Warga Indonesia atau WNI, Masyarakat yang tergolong miskin atau rentan miskin, dan harus terdaftar di DTKS Kemensos atau di link resmi Kemensos, serta bansos sembako tidak diberikan kepada mereka para anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

2) Sumber Daya

Keberhasilan kebijakan ini juga tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan hal ini ketersediaan sumber daya manusia serta sumber daya lain yang finansial dan waktu. Apabila sumber daya memenuhi syarat maka implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama TKSK Kecamatan Wara Selatan, bahwasannya sumber daya yang ada telah sesuai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan pemerintah juga sudah bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini agen bank yang telah memfasilitasi penerima dalam melakukan transaksi pencairan bantuan sembako di e-warong yang tersedia. Dalam hal penyaluran bantuan yang diperoleh oleh masyarakat pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan jumlah saldo rekening yang diterima sebanyak Rp. 200.000,00 dan saldo ini dapat ditukarkan dengan sembako di e-warong yang telah disediakan dan telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah sebagai penyalur sembako bagi penerima bantuan KKS.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yaitu aturan yang mencakup pada norma-norma, birokrasi, dan pola hubungan yang terjadi pada birokrasi itu sendiri. Hal ini terkait dengan kemampuan para Agen Pelaksana dalam mengelola penyaluran bantuan KKS kepada masyarakat yang dianggap memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah dan BPS. Agen pelaksana ini bertugas mendata dan memberikan fasilitas arahan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu KKS dan tujuan dari adanya KKS tersebut bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, Agen Pelaksana yang ditunjuk mengelola Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala adalah para aparat Kelurahan yang diberikan mandate berupa SK oleh Lurah yang akan mereka gunakan dalam memberikan sosialisasi terkait KKS dan penyaluran KKS kepada masyarakat di Kelurahan Takkalala Kota Palopo. Yang menjadi kendala adalah ternyata para Agen Pelaksana ini menurut peneliti masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya, selain itu para agen pelaksana yang ditunjuk sebagai e-waroeng masih terdapat yang kurang jujur dan menawarkan harga barang sangat mahal kepada masyarakat penerima bantuan KKS ini.

4) Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Pelaku

Dalam hal ini, untuk sikap para pelaksana yang di mana dalam hal ini sikap atau cara pelayanan kepada para penerima pada saat pendampingan seharusnya dengan teliti, ramah, dan juga sigap dalam menerima setiap keluhan dari para penerima. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sikap para petugas di tempat pelayanan sangat sesuai dengan peraturan, ini dapat dilihat dari sikap mereka yang ramah dalam melayani masyarakat penerima bantuan KKS.

5) Komunikasi Antar – Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam hal komunikasi, ini juga sangat diperlukan sebab dengan adanya komunikasi antara pihak penyelenggara dengan penerima sasaran agar setiap program dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat akan melakukan menyalurkan pihak pusat akan mengeluarkan nama-nama penerima kepada pihak kelurahan dan juga berserta dengan jadwal penyalurannya sehingga pihak kelurahan dapat memberitahukan hal tersebut kepada setiap calon penerima yang akan disalurkan bantuannya. Selain itu, dalam hal ini pihak Kelurahan hanya sebatas menginformasikan kepada masyarakat terkait nama-nama dan jadwal penyaluran yang akan diselenggarakan, yang dimana Kelurahan Takkalala memiliki jumlah penerima KKS sebanyak 263 keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antara Organisasi dan aktivitas pelaksana kepada sasaran belum efektif sebab pemerintah kelurahan hanya melaksanakan perintah dari pihak pusat dalam pelaksanaannya sehingga dari data tersebut banyak didapatkan penerima yang belum tepat sasaran.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi lingkungan yang ada di daerah Kelurahan Takkalala didominasi oleh perumahan dan juga penduduk yang banyak, termasuk dalam wilayah dataran rendah dikarenakan seringnya terjadi banjir khususnya di daerah pesisir pantai. Sehingga dari kondisi ini dapat dilihat bahwa masyarakat di Kelurahan Takkalala tergolong Pra Sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Takkalala memiliki permukiman yang padat penduduk terutama warga yang memiliki pendapatan paling rendah yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya masyarakat miskin sekitar 777 KK dengan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 263 KK. Sebagian wilayah Takkalala khususnya di pesisir pantai sering mengalami banjir ketika air laut pasang dan terjadi hujan lebat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan di Kelurahan Takkalala merupakan kawasan yang padat penduduk dengan kondisi sebagaimana lingkungan yang rawan banjir ketika hujan serta wilayah Takkalala termasuk ke dalam kawasan prasejahtera yang dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan KKS tersebut.

Dari hasil pengamatan keadaan di lapangan Kelurahan Takkalala merupakan salah satu wilayah pelaksana program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Wara Selatan. Hasil pelaksanaan kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala masih belum berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan ada beberapa warga miskin yang masih belum bisa menerima manfaat dari bantuan sosial ini terutama bantuan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pihak yang menangani program ini, serta data penerima program ini tidak akurat dan tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan banyaknya kecemburuan antar warga yang ada di wilayah itu.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera yaitu ketidaksesuaian data sehingga tidak tepat sasaran. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparatur Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program-program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan lambatnya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penetapan masyarakat penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber penelitian menjelaskan bahwa dalam hal pendataan pemerintah pusat masih memiliki banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, dengan hal tersebut banyak warga yang memiliki kecemburuan sosial sebab mereka melihat bahwa sebagian penerima bantuan KKS ini sudah masuk dalam kategori masyarakat mampu dalam hal finansial. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini, pemerintah masih kurang dalam hal sosialisasi terkait pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta lambatnya aparat kelurahan dalam melakukan validasi data dikarenakan proses verifikasi data dari pusat lambat dalam memberikan informasi terkait usulan bantuan penerima KKS, padahal masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan bisa untuk diberikan bantuan, masyarakat juga belum mengetahui seperti apa itu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala yaitu masih kurangnya sosialisasi terkait dengan penyaluran program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini kepada masyarakat yang belum menerima bantuan ini, pendataan yang dilakukan secara tertutup oleh pemerintah pusat, dan lambannya aparat kelurahan dalam melakukan validasi sebab pihak kelurahan hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat, sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan data tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pada Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tujuan dari adanya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah membantu meringankan beban keluarga miskin dalam hal bantuan pangan yang dinominalkan Rp. 200.000,00 perbulan yang diterima pertiga bulan. Penerima bantuan KKS adalah warga masyarakat yang datanya terdata di DTKS pusat. Walaupun secara data valid, sudah ada beberapa perubahan data dikarenakan sudah ada beberapa warga masyarakat dari segi finansial sudah tidak layak mendapatkan bantuan KKS karena sudah dianggap mampu atau bukan lagi kategori masyarakat miskin, begitupun sebaliknya. Selain itu, kurangnya faktor sosialisasi dan data valid terbaru dari Pemerintah Pusat membuat Unit Pelaksana yakni Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan Takkalala merasa selalu dipojokkan oleh masyarakat karena dianggap tidak adil, sehingga perlu perbaikan data baru dan Pemerintah Kelurahan

Takkalala harus melaporkan data baru guna mencegah kecemburuan sosial yang ada di tengah masyarakat Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Diharapkan pula agar pemerintah kedepannya lebih bisa memperhatikan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala sehingga penyaluran lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga diharapkan lebih transparan dalam melakukan pendataan dan menginfokan lebih cepat tentang pengusulan baru data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2019). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanik.
- Abdul Kadir. (2021). 14 Kabupaten/Kota di Sulse Lolos Verifikasi KKS 2021. Diakses melalui <https://makassar.antarane.ws.com/berita/323145/14-kabupatenkota-di-sulse-lolos-verifikasi-kks-2021>.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2011 untuk Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor.541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS) Sebagai Pengganti Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari APBN-P 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Subejo. (2007). Memahami Dan Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*. 3 (1), p. 13-25.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutmasa, Yosep. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*. 4. 25-36. 10.47532/jic.v4i1.242.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.